



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 188.45/51A/KPTS/402.013/2022

TENTANG

DAFTAR DATA
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun dan untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, perlu menyusun Daftar Data Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023;
16. Peraturan Bupati Madiun Nomor 24 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun;

17. Peraturan Bupati Madiun Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun;

Menetapkan :

KESATU : Daftar Data Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun Tahun 2022;

KETIGA : Dalam rangka mencukupi Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Perangkat Daerah wajib mengajukan rekomendasi dan metadata kegiatan Statistik kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun selaku Pembina Data Daerah;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

MEMUTUSKAN:

Ditetapkan di Caruban

pada tanggal 18 Januari 2022



AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Inspektur Kab. Madiun;
2. Kepala Perangkat Daerah Kab. Madiun;
3. Kepala Bappeda Kab. Madiun;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Madiun;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Madiun;
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 188.45/51A/KPTS /402.013/2022
TENTANG
DAFTAR DATA PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2022

DAFTAR DATA PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

NO	PERANGKAT DAERAH	DAFTAR DATA
1	2	3
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	a. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat c. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat d. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan e. APS PAUD f. APS SD g. APS SMP h. Cakupan pembinaan sejarah i. Indeks Pendidikan j. Jumlah Guru PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Jenis Kelamin k. Jumlah Guru PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Pendidikan Terakhir l. Jumlah Guru PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Menurut Kecamatan m. Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status (Negeri/Swasta) n. Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan menurut Kecamatan o. Jumlah murid SD/ sederajat usia 7-12 tahun p. Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang masih bersekolah q. Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Jenis Kelamin r. Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status (Negeri/Swasta) s. Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status Kesiswaan t. Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Agama u. Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Menurut Kecamatan v. Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD w. Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) x. Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan y. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan z. Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan aa. Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun bb. Persentase budaya daerah yang dilestarikan

1	2	3
		cc. Persentase budaya lokal yang dilestarikan
		dd. Persentase cagar budaya yang ditetapkan
		ee. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV
		ff. Persentase kurikulum PAUD yang dilaksanakan
		gg. Persentase kurikulum SD yang dilaksanakan
		hh. Persentase lembaga pendidikan kesetaraan yang terakreditasi
		ii. Persentase lembaga pendidikan PAUD yang terakreditasi
		jj. Persentase lembaga SD terakreditasi A
		kk. Persentase lembaga SMP terakreditasi A
		ll. Persentase tenaga pendidik yang tersertifikasi
		mm. Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun
2.	DINAS KESEHATAN	a. Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup
		b. Angka Kematian Bayi
		c. Angka Kematian Ibu
		d. Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup
		e. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
		f. Indeks Kesehatan
		g. Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/ kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran
		h. Jumlah balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar + Jumlah balita usia 24-35 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Jumlah balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
		i. Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun
		j. Jumlah Bayi Berdasarkan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Menurut Kecamatan
		k. Jumlah desa siaga aktif Purnama Mandiri (PURI) Menurut Kecamatan
		l. Jumlah desa/kelurahan yang sudah Stop Buang Air Besar di Sembarang Tempat (Stop BABS) Menurut Kecamatan
		m. Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/ kota dalam kurun waktu satu tahun
		n. Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/ kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun
		o. Jumlah Kasus Penyakit Diftery, Pertusis, Tetanus, Hepatitis B dan Suspek Campak yang Dapat Dicegah dengan imunisasi Menurut Kecamatan
		p. Jumlah Kasus Penyakit Menular Menurut Kecamatan
		q. Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular Menurut Kecamatan
		r. Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) Di Desa/Kelurahan Yang Ditangani < 24 Jam Menurut Kecamatan
		s. Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan
		t. Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja kabupaten/ kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

1	2	3
		u. Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan sesuai standar Menurut Kecamatan v. Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun w. Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun x. Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/ kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun y. Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun z. Jumlah puskesmas berdasarkan pelayanan rawat inap dan non rawat inap Menurut Kecamatan aa. Jumlah rumah sakit berdasarkan akreditasi rumah sakit Menurut Kecamatan bb. Jumlah rumah sakit berdasarkan jenis rumah sakit Menurut Kecamatan cc. Jumlah rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit Menurut Kecamatan dd. Jumlah screening Penyakit Tidak Menular (PTM) bagi penduduk berisiko usia > 15 tahun secara kumulasi Menurut Kecamatan ee. Jumlah Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks Menurut Kecamatan ff. Jumlah tempat tidur di rumah sakit berdasarkan kelas Menurut Kecamatan gg. Jumlah tenaga kesehatan Menurut Kecamatan hh. Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/ kota dalam kurun waktu satu tahun ii. Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan Kesehatan jj. Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan Menurut Kecamatan kk. Kejadian Malaria per 1000 orang ll. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Dinas Kesehatan mm. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan nn. Persentase Balita obesitas (BB/TB) kelompok umur 0-59 bulan oo. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif pp. Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri qq. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi rr. Persentase keberhasilan pengobatan TB ss. Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan tt. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas uu. Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit vv. Persentase penderita HIV yang mendapat ARV ww. Persentase peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan

1	2	3
		xx. Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar kompetensi
		yy. Prevalensi Balita Stunting
		zz. Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita (0-23 bulan)
		aaa. Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita (0-59 bulan)
		bbb. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta
		ccc. Prevalensi tekanan darah tinggi
3.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CARUBAN	a. Kepuasan ASN terhadap pelayanan RSUD Caruban
		b. Nilai SAKIP RSUD CARUBAN
		c. Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar
		d. Persentase capaian indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar
		e. Persentase capaian indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar
		f. Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar
		g. Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar kompetensi
4.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOLOPO	a. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah
		b. Nilai SAKIP RSUD Dolopo
		c. Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar
		d. Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar
		e. Persentase indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar
		f. Persentase indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar
		g. Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar kompetensi
5.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	a. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		b. Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		c. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
		d. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
		e. Persentase bangunan dan lingkungan yang ditata
		f. Persentase dokumen rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang tersusun
		g. Persentase jumlah jembatan kondisi baik
		h. Persentase luas baku sawah yang terlayani air irigasi
		i. Persentase panjang jalan kabupaten kondisi mantap
		j. Persentase panjang jalan lingkungan kondisi baik
		k. Persentase peningkatan jumlah SDM jasa konstruksi yang bersertifikat
		l. Persentase penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah yang terpenuhi
		m. Persentase perluasan akses pelayanan air bersih (SR)
		n. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak

1	2	3
		o. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak
		p. Persentase saluran drainase kondisi baik
		q. Persentase sarana limbah domestik setempat yang terbangun
		r. Persentase trotoar kondisi baik
6.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	a. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang b. Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang c. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari d. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik e. Persentase bangunan dan lingkungan yang ditata f. Persentase dokumen rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang tersusun g. Persentase jumlah jembatan kondisi baik h. Persentase luas baku sawah yang terlayani air irigasi i. Persentase panjang jalan kabupaten kondisi mantap j. Persentase panjang jalan lingkungan kondisi baik k. Persentase peningkatan jumlah SDM jasa konstruksi yang bersertifikat l. Persentase penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah yang terpenuhi m. Persentase perluasan akses pelayanan air bersih (SR) n. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak o. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak p. Persentase saluran drainase kondisi baik q. Persentase sarana limbah domestik setempat yang terbangun r. Persentase trotoar kondisi baik
7.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	a. Indeks Demokrasi Indonesia b. Indeks Keamanan Manusia c. Indeks Solidaritas d. Indeks Toleransi e. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri f. Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri g. Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina h. Persentase penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya i. Persentase Penyelenggaraan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
8.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	a. Indeks Stabilitas b. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara c. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran d. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Non kebakaran e. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja

1	2	3
		f. Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja g. Persentase kasus kebakaran yang tertangani h. Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sesuai ketentuan i. Persentase kasus non kebakaran yang tertangani j. Persentase kasus Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan sesuai ketentuan
9.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	a. Indeks Risiko Bencana b. Jumlah desa tangguh bencana yang baru dibentuk dikawasan rawan bencana c. Jumlah dokumen penanggulangan bencana yang disusun d. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana e. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana f. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana g. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan BPBD h. Nilai SAKIP BPBD i. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana terbentuk j. Persentase korban terdampak bencana yang ditangani k. Persentase pemulihan pasca bencana yang direalisasikan l. Persentase sistem peringatan dini / EWS yang berfungsi
10.	DINAS SOSIAL	a. Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti b. Jumlah Anak terlantar di luar panti sosial berdasarkan jenis kelamin menurut Kecamatan c. Jumlah Gelandangan dan Pengemis di luar panti sosial berdasarkan jenis kelamin menurut Kecamatan d. Jumlah Korban Bencana Alam menurut jenis bencana e. Jumlah Korban Bencana Sosial menurut jenis bencana f. Jumlah Lanjut Usia Terlantar di luar panti sosial berdasarkan jenis kelamin menurut Kecamatan g. Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar berdasarkan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) h. Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial berdasarkan jenis kelamin menurut Kecamatan i. Jumlah PMKS di luar panti sosial berdasarkan jenis kelamin j. Jumlah PMKS di luar panti sosial menurut Kecamatan k. Jumlah Pusat Kesejahteraan Sosial menurut Kecamatan l. Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial menurut Kecamatan m. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan n. Jumlah Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti o. Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti p. Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/Kota

1	2	3
		q. Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti
		r. Jumlah Warga Negara lanjut usia terlanter yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti
		s. Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti
		t. Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlanter yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti
		u. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Dinas Sosial
		v. Nilai SAKIP Dinas Sosial
		w. Persentase desa / kelurahan yang diberdayakan
		x. Persentase Fakir Miskin yang memperoleh bantuan sosial dan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya
		y. Persentase kepesertaan jaminan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin
		z. Persentase Korban Bencana Alam yang menerima bantuan dan bantuan khusus pasca Bencana
		aa. Persentase Lanjut Usia Terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
		bb. Persentase Penyandang Cacat yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya
		cc. Persentase personil Tanaga yang dibina
		dd. Persentase PPKS yang tertangani
		ee. Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
11.	DINAS TENAGA KERJA	a. Angka sengketa Perusahaan Pekerja Per tahun
		b. Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme AKAN
		c. Jumlah rencana pembangunan industri
		d. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Dinas Tenaga Kerja
		e. Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja
		f. Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan
		g. Persentase IKM yang memanfaatkan SIINas
		h. Persentase IKM yang mendapatkan ijin usaha
		i. Persentase lulusan pelatihan kerja yang bekerja
		j. Persentase pencari kerja yang ditempatkan
		k. Persentase transmigran umum yang berhasil
12.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	l. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
		a. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)
		b. Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern
		c. Indeks Pembangunan Gender
		d. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		e. Nilai SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1	2	3
		f. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)
		g. Persentase dokumen data informasi kependudukan yang tersusun
		h. Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang aktif
		i. Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang aktif
		j. Persentase masyarakat yang memahami program Bangkacencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)
		k. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need
		l. Persentase Penanganan Perempuan Korban Kekerasan
		m. Persentase perkawinan dengan usia istri dibawah 20 Tahun
		n. Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. (kelompok penduduk 40% terbawah)
		o. Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern
		p. Rasio kekerasan terhadap anak
		q. Rasio kekerasan terhadap perempuan
		r. Total Fertility Rate (TFR)
		s. Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)
13.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	a. Cakupan masyarakat yang mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup
		b. Cakupan penghijauan wilayah potensi longsor dan sumber mata air
		c. Indeks Kualitas Air
		d. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
		e. Indeks tutupan hutan
		f. Jumlah penerima penghargaan lingkungan hidup
		g. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup
		h. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola
		i. Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup
		j. Persentase industri yang menerapkan sistem pengolahan limbah B3
		k. Persentase izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan
		l. Persentase layanan pelaku usaha dan kegiatan yang menerapkan dokumen lingkungan
		m. Persentase limbah B3 yang dikelola
		n. Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani
		o. Persentase sampah yang tertangani
		p. Tersusunnya dan terlaksananya dokumen perencanaan lingkungan hidup
14.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	a. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		b. Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		c. Persentase database kependudukan yang valid
		d. Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil

1	2	3
		e. Persentase penduduk yang sudah memiliki dokumen kependudukan f. Persentase penduduk yang sudah menerima dokumen kependudukan g. Prosentase penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam satu tahun
15.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	a. Jumlah Desa Mandiri b. Jumlah desa tertinggal c. Jumlah kerja sama Desa yang terbentuk d. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa e. Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa f. Persentase BUMDesa yang aktif g. Persentase Desa dengan dokumen perencanaan pembangunan yang baik h. Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik i. Persentase Desa Mandiri j. Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Desa k. Persentase Lembaga Ekonomi yang aktif l. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif
16.	DINAS PERHUBUNGAN	a. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Dinas Perhubungan b. Nilai SAKIP Dinas Perhubungan c. persentase angka tertib lalu lintas d. Persentase kendaraan laik jalan e. Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik f. persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berkeselamatan
17.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	a. Indeks SPBE b. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika c. Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika d. Persentase data statistik sektoral yang tersedia dan valid e. Persentase pengamanan informasi pemerintah daerah f. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan aplikasi layanan SPBE g. Presentase Desiminasi layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang ditetapkan h. Proporsi individu yang menggunakan Internet i. Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam
18.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO	a. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro b. Nilai SAKIP Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro c. Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya d. Persentase koperasi yang berkualitas.

1	2	3
		e. Persentase koperasi yang sehat f. Persentase koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi. g. Persentase Koperasi yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan. h. Persentase pengajuan pembiayaan KUKM yang lulus verifikasi i. Persentase peningkatan fasilitas Produk Ekspor Unggulan j. Persentase peningkatan pelaksanaan metrologi legal k. Persentase peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah l. Persentase Peningkatan pengembangan UMKM m. Persentase peningkatan penjualan produk dalam negeri n. Persentase peningkatan rekomendasi perizinan yang diterbitkan o. Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan p. Persentase Perijinan Koperasi yang diterbitkan.
19.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	a. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu b. Minat Investasi c. Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu d. Persentase investor yang difasilitasi dalam kegiatan penanaman modal e. Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perizinan dan non perizinan f. Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan LKPM g. Rata-rata waktu penyelesaian perizinan dan Non Perizinan
20.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	a. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara b. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga c. Nilai SAKIP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga d. Persentase atlet yang berprestasi e. Persentase pemuda yang berprestasi f. Persentase pengembangan daya tarik yang dilaksanakan g. Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif h. Persentase peningkatan pelaku industri pariwisata i. Persentase peningkatan promosi pariwisata yang dilaksanakan j. Spending of Money (Pengeluaran Wisatawan)
21.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	a. Indeks Keberadaan dan Keutuhan Arsip b. Indeks Ketersediaan Arsip c. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan d. Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan e. Persentase Perpustakaan Terakreditasi
22.	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN	a. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Dinas Pertanian dan Perikanan b. Nilai SAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan c. Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian d. Persentase lahan pertanian yang bebas dari bencana pertanian

1	2	3
		e. Persentase peningkatan hasil Produk Olahan Asal Ikan f. Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik g. Persentase peningkatan kelas kelompok tani h. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya i. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
23.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	a. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan b. Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan c. Persentase Daerah Rawan Pangan yang Tertangani d. Persentase kasus kesehatan hewan yang tertangani e. Persentase pangan segar asal tanaman (PSAT) yang aman f. Persentase ternak bunting dari pemeriksaan kebuntingan (PKb) g. Persentase terpeliharanya prasarana peternakan h. Presentase peningkatan kualitas peternak dan pelaku usaha ternak i. Tingkat Capaian Angka Kecukupan Energi dan protein
24.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	a. Angka Kemiskinan b. Angka Pertumbuhan Ekonomi c. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur d. Indeks Kesalehan Sosial e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) f. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah g. Nilai SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah h. Pengeluaran Perkapita Makanan i. Persentase PD Bidang Ekonomi dan SDA dengan capaian hasil outcome minimal 75% j. Persentase PD Bidang IPW dengan capaian hasil outcome minimal 75% k. Persentase PD Bidang PPM dengan capaian hasil outcome minimal 75% l. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti/ diterbitkan/ dipublikasikan m. Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Inovasi Daerah n. Persentase perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan ketentuan o. Pertumbuhan PDRB Unggulan (Pertanian, Industri, Perdagangan)
25.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	a. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Badan Pendapatan Daerah b. Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah c. Persentase peningkatan target PAD setiap tahunnya
26.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	a. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah b. Nilai SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah c. Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP d. Persentase OPD yang tertib tata kelola barang milik daerah

1	2	3
27.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	a. Indeks Profesionalitas ASN b. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Badan Kepegawaian Daerah c. Nilai SAKIP Badan Kepegawaian Daerah d. Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi e. Persentase kedisiplinan ASN f. Persentase mutasi jabatan sesuai kualifikasi g. Persentase penetapan kebutuhan ASN h. Persentase Penilaian Kinerja ASN
28.	INSPEKTORAT	a. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Inspektorat b. Level kapabilitas APIP atau jumlah rumusan kebijakan teknis pengawasan c. Nilai SAKIP Inspektorat d. Opini atas Audit BPK e. Persentase OPD yang mendapatkan Nilai hasil Evaluasi SAKIP Memuaskan (A) f. Persentase pendampingan, asistensi, dan verifikasi kepada OPD yang sesuai peraturan berlaku g. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti h. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
29.	SEKERTARIAT DPRD	a. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Sekertariat DPRD b. Nilai SAKIP Sekertariat DPRD c. Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah APBD d. Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah Non APBD e. Persentase fasilitasi penganggaran dan pengawasan f. Persentase fasilitasi tugas dan fungsi DPRD g. Persentase layanan kesejahteraan DPRD h. Persentase layanan keuangan DPRD i. Persentase penyelenggaraan administrasi DPRD
30.	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	a. Persentase Rumusan Kebijakan Pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai kebutuhan
31.	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	a. Persentase Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Daerah dan Sekretaris Daerah yang difasilitasi
32.	BAGIAN HUKUM	a. Jumlah Rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Bidang hukum
33.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	a. Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Difasilitasi b. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai kebutuhan
34.	BAGIAN ORGANISASI	a. Indeks Kepuasan Masyarakat b. Indeks Reformasi Birokrasi c. Nilai SAKIP

1	2	3
		d. Persentase PD Pengampu pelayanan masyarakat yang sesuai dengan mutu pelayanan
		e. Persentase Rumusan Kebijakan KetataLaksanaan Organisasi yang ditetapkan sesuai kebutuhan
35.	BAGIAN PEMERINTAHAN	a. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai kebutuhan
36.	BAGIAN UMUM	a. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Sekretariat Daerah
		b. Nilai SAKIP Sekretariat Daerah
		c. Persentase Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang di Fasilitas
37.	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	a. Jumlah Rumusan Kebijakan Pengelolaan Barang dan Jasa yang ditindaklanjuti
38.	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	a. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditetapkan sesuai kebutuhan
39.	KECAMATAN KEBONSARI	a. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Kecamatan Kebonsari
		b. Nilai SAKIP Kecamatan Kebonsari
		c. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		d. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		e. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		f. Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan
		g. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
40.	KECAMATAN GEGER	a. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Kecamatan Geger
		b. Nilai SAKIP Kecamatan Geger
		c. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		d. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		e. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		f. Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan
		g. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
41.	KECAMATAN DOLOPO	a. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Kecamatan Dolopo
		b. Nilai SAKIP Kecamatan Dolopo
		c. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		d. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		e. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		f. Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan
		g. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1	2	3
42.	KECAMATAN DAGANGAN	a. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Kecamatan Dagangan
		b. Nilai SAKIP Kecamatan Dagangan
		c. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		d. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		e. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		f. Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan
		g. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
43.	KECAMATAN WUNGU	a. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Kecamatan Wungu
		b. Nilai SAKIP Kecamatan Wungu
		c. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		d. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		e. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		f. Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan
		g. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
44.	KECAMATAN KARE	a. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Kecamatan Kare
		b. Nilai SAKIP Kecamatan Kare
		c. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		d. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		e. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		f. Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan
		g. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
45.	KECAMATAN GEMARANG	a. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Kecamatan Gemarang
		b. Nilai SAKIP Kecamatan Gemarang
		c. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		d. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		e. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		f. Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan
		g. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
46.	KECAMATAN PILANGKENCENG	a. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Kecamatan Pilangkenceng
		b. Nilai SAKIP Kecamatan Pilangkenceng
		c. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		d. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

1	2	3
		e. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa f. Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan g. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
47.	KECAMATAN MEJAYAN	a. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Kecamatan Mejayan b. Nilai SAKIP Kecamatan Mejayan c. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum d. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan e. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa f. Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan g. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
48.	KECAMATAN WONOASRI	a. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Kecamatan Wonoasri b. Nilai SAKIP Kecamatan Wonoasri c. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum d. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan e. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa f. Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan g. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
49.	KECAMATAN BALEREJO	a. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Kecamatan Balerejo b. Nilai SAKIP Kecamatan Balerejo c. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum d. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan e. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa f. Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan g. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
50.	KECAMATAN SAWAHAN	a. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Kecamatan Sawahan b. Nilai SAKIP Kecamatan Sawahan c. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum d. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan e. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa f. Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan g. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

51.	KECAMATAN JIWAN	a. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Kecamatan Jiwan
		b. Nilai SAKIP Kecamatan Jiwan
		c. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		d. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		e. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		f. Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan
		g. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
52.	KECAMATAN SARADAN	a. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Kecamatan Saradan
		b. Nilai SAKIP Kecamatan Saradan
		c. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		d. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		e. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		f. Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan
		g. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
53	KECAMATAN MADIUN	a. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Kecamatan Madiun
		b. Nilai SAKIP Kecamatan Madiun
		c. Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		d. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		e. Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		f. Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan
		g. Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum



 BUPATI MADIUN,

 AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO